

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- Ali, Chidir, 2014, *Badan Hukum*, Bandung : PT Alumni.
- Ali, Faried, 1996, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta Timur:Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R.,1968, *Buku Penuntun Geografis Sosial*, Yogyakarta: Penerbit UP Spring.
- Bouman, P.J., 1971, *Sociologie Begrippen en Problemen*(diterjemahkan oleh Sugitno Sujitno), Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Budiono, Herlien 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*,2007, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Heryono, Tri Agus, 2015, *Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- HS, Salim, 20013, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 2001, *Modul Hukum Dagang*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Kohar, A, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung : Alumni.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu, 1984, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bina Aksara

Notodisoerojo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali Press.

Nurdin, Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung : PT Alumni.

Raharjo, Handri, 2013, *Perusahaan Step by Step Pendirian Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Soemitro, Rochmat, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Tobing, GHS. Lumban ,1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

Toedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bigraf Publishing.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.

Wironegoro, Rio. K, *Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta di bidang Notariat*

B. Jurnal, Makalah, Artikel

Adjie, Habib, 2016, *Memahami dan Mengerti Badan Usaha Milik Desa*.

Dewi, Amelia Sri Kusuma, 2010, *Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian BUM Desa sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*, Pamator, Vol. 3, No. 2.

Khairandy, Ridwan, 2016, *Karakteristik Badan Usaha Milik Desa*.

Hussain, Acmad, *BUMDes Berbasis Potensi Lokal*, Suara Merdeka, 1 Juni 2016

Nurwulan, Pandam, 2016, *BUM Desa dalam Perspektif Notaris*, Kedaulatan Rakyat, 19 Maret 2016.

C. Internet

Kedudukan BUMN dalam Hukum Positif Indonesia, 4 Maret 2017, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/52500/3/Chapter%20II.pdf>
Kementerian Informasi Pusat, *Daftar Badan Publik*, 19 Maret 2017, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/daftar-badan-publik>

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan
Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.